

ALAT KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

Oleh :
Wilson Bangun

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana cadangan terhadap besarnya uang beredar dan alat kebijakan moneter yang digunakan pemerintah dalam mengawasi kegiatan ekonomi. Bank Sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang beredar melalui komposisi dana cadangan.

Yang merupakan alat kebijakan moneter adalah pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif dan moral suasion. Pengendalian kredit umum terdiri dari tiga yaitu *reserves requirement policy*, *open market operation*, dan *rediscount rate policy*. Pengendalian kredit selektif dapat positif maupun negatif. Pengendalian negatif menurunkan penawaran atau menaikkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. Pengendalian positif menaikkan penawaran atau menurunkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. Kebijakan moral suasion merupakan metode untuk menghimbau para bankir dan pengusaha untuk mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan Bank Sentral.. Kebijakan moneter yang digunakan di Indonesia adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, Giro Wajib Minimum (GWM), dan Moral Suasion (persuasi moral).

Kata Kunci : *Reserves Requirement policy, open market operation, open market operation, rediscount rate policy, positive control, negative control, moral suasion, the money multiplier.*

Pendahuluan

Kebijaksanaan moneter sebagai salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro yang pada dasarnya merupakan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar agar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Melalui pengendalian jumlah uang beredar tersebut diharapkan dapat dicapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan terjadinya inflasi akibat bertambahnya jumlah uang beredar sehingga

mendorong permintaan barang-barang atau disebut *demand full inflation*.

Sasaran kebijakan moneter adalah cadangan dana pada sistem perbankan. Dana cadangan tersebut merupakan benda material di luar kredit yang dibuat oleh lembaga-lembaga kredit dan bank yang dapat menyebabkan penawaran uang berkembang. Karena perkembangan penawaran uang sangat erat kaitannya dengan perubahan pendapatan, produksi, harga dan lapangan kerja maka pemerintah pusat sangat memperhatikan fluktuasi jumlah dana cadangan yang dimiliki lembaga-lembaga.

Pada umumnya tujuan kebijaksanaan moneter di negara sedang berkembang berkaitan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar dan kredit, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah uang beredar harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya deflasi. Stabilitas harga sangat perlu dipertimbangkan bagi negara-negara sedang berkembang, karena merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Sebagai kontribusi bagi kebijakan moneter dalam mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, secara tidak langsung dapat dikatakan ikut membantu pencapaian *full employment*.

Di banyak negara yang sedang berkembang adanya pengangguran dan rendahnya pendayagunaan merupakan masalah yang kronis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Milton Friedman (1968) dalam Iswardono (2000), bahwa penggunaan kebijakan moneter dengan menentukan suatu tingkatan pengangguran tertentu bertentangan dengan tingkat yang dikatakan material untuk suatu perekonomian dapat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian. Alasan yang diberikan adalah dalam menghadapi pertumbuhan, tingkat otoritas moneter dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan harapan dapat mengurangi tingkat pengangguran sehingga berada di bawah tingkat material yang mendekati sasaran yang diinginkan oleh otoritas moneter. Akan tetapi, harga akan naik dalam jangka pendek dan upah riilnya akan turun dalam arti upah nominal akan naik yang diikuti bertambahnya jumlah tenaga kerja. Di lain pihak, turunnya upah riil akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Sebagaimana inflasi akan selalu ada dalam jangka panjang, demikian juga dengan pengangguran.

Apabila penguasa moneter meningkatkan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar untuk mengawasi keadaan tersebut, dalam jangka panjang pengangguran akan muncul lagi yang disebabkan adanya inflasi yang menyebabkan perekonomian tidak akan stabil.

Sasaran kebijakan moneter yang ingin dicapai oleh otoritas moneter di Indonesia pada prinsipnya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tingkat bunga, keseimbangan neraca pembayaran serta mencapai pemenuhan kesempatan kerja. Untuk mencapai sasaran kebijakan moneter tersebut, ada tiga alat yang digunakan antara lain *reserves requirement policy*, *open market operation*, dan *rediscount rate policy*. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melakukan tugas pengendalian moneter yang meliputi perencanaan pemantauan dan pengambilan kebijakan. Dalam aspek perencanaan, Bank Indonesia melakukan penelitian mengenai hubungan-hubungan yang terkait sehingga dapat diketahui berapa jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian untuk suatu periode tertentu.

Komposisi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan sejumlah deposit yang ada di lembaga keuangan bank atas dana yang tersimpan terhadap uang kartal. Dana cadangan tersebut terbagi menjadi dua bagian, antara lain *required reserves*, dan *excess reserves*. Jadi :

$$\text{Total Reserves} = \text{required reserves} + \text{excess reserves}$$

Required reserves adalah jumlah uang kartal dan deposit yang ada di bank sentral di mana lembaga-lembaga peminjaman harus menahan pada pinjaman masyarakat. Jadi *Required reserves* adalah sejumlah dana dari simpanan masyarakat yang ditahan oleh bank umum berdasarkan ketentuan Bank Sentral. Menurut Rose (1997:464) *Required reserves are those holding of cash and deposits at the fed that a depository institution hold to back the public's deposits*. Sedangkan *Excess reserves* merupakan kelebihan dana cadangan pada bank umum setelah mengurangi total cadangan dengan *required reserves*. *Excess Reserves* adalah sejumlah dana yang dapat dipinjamkan Bank Umum kepada masyarakat lainnya. Menurut Rose (1997:464) *excess reserves are the amount of reserves left over after we deduct required from total legal of reserves*. Jadi *excess reserves* dapat melipatgandakan jumlah uang yang beredar di

masyarakat, tetapi pertambahan semakin lama semakin kecil setiap proses peminjaman kepada masyarakat. Jadi besarnya *excess reserves* dipengaruhi oleh besarnya *required reserves* yang ditentukan oleh Bank Sentral.

The Money Multiplier

Proses Multiplier dapat melibatkan empat pihak antara lain: Bank Sentral, bank-bank umum, para penabung, dan peminjam. Bank Sentral menyediakan cadangan kepada bank umum dan juga mewajibkan bank umum untuk menahan suatu persentase deposito yang ditempatkan masyarakat pada bank-bank umum sebagai cadangan. Bank-bank umum memainkan peranan utama mereka dalam *money multiplier*, meminjamkan sisa deposito-deposito (atau sebagian besar sisanya) kepada para peminjam dengan suku bunga yang melebihi suku bunga rekening giro. Bagi bank apapun, sisa tersebut sama dengan jumlah deposito dikurangi cadangan wajib, yang bisa digambarkan sebagai jumlah deposito kali (1-rasio cadangan wajib). Jelas bahwa dana yang dipinjamkan suatu bank kepada seorang peminjam bisa menjadi deposito peminjam tersebut pada bank yang lain. Keputusan peminjam dana untuk menempatkan kekayaan sebagai deposito, bukannya kas, juga mempengaruhi *money multiplier*. Kemudian, bank kedua tersebut harus menahan sebagian deposito yang baru ditempatkan tersebut sebagai cadangan dan bisa meminjamkan sisanya kepada para peminjam yang lain. Selanjutnya, bank ke tiga, dan seterusnya melakukan hal yang sama, sehingga terjadi proses multiplier.

Proses ini adalah suatu bentuk dari *multiplier series* yang bisa diekspresikan dalam suatu formula aljabar. Jika kita anggap ΔTDD sebagai total deposito (rekening giro) yang tercipta, ΔR sebagai cadangan-cadangan yang diinjeksikan ke dalam sistem melalui pembelian surat-surat berharga, dan REQ sebagai rasio cadangan wajib, maka total deposito baru yang ditimbulkan oleh ekspansi injeksi cadangan akan sama dengan :

$$\begin{aligned} \Delta TDD = & \Delta R + (1-REQ) \times \Delta R + (1-REQ)^2 \times \Delta R + \\ & (1-REQ)^3 \times \Delta R + (1-REQ)^4 \times \Delta R + \dots + \\ & (1-REQ)^n \times \Delta R \end{aligned}$$

Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi :

$$\Delta TDD = \Delta R / REQ$$

Sebaliknya, proses pengurangan uang beredar bekerja dalam cara yang berlawanan. Jika Bank Sentral ingin mengurangi cadangan dari sistem dan mengurangi kemampuan bank untuk meminjamkan dana, Bank Sentral akan menjual sekuritas-sekuritas. Penurunan cadangan karena publik menukarkan deposito-deposito dengan sekuritas-sekuritas menyebabkan bank-bank hanya bisa memberikan pinjaman yang lebih sedikit atau hanya memperbaharui pinjaman yang lama.

Alat Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun di luar pengawasan pemerintah. Kebijaksanaan moneter merupakan faktor yang dapat diawasi pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Di samping itu, kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan perdagangan, industri, keuangan, kesempatan kerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pola kebijakan ekonomi pada umumnya. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kebijakan moneter sangat penting dalam pembentukan tabungan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat kredit, yang nantinya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Bank Sentral sebagai otoritas moneter dapat melaksanakan kebijakan moneter dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk : pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif, *moral suasion*.

Pengendalian Kredit Umum

Sebagai alat kebijakan moneter pada pengendalian kredit umum terdiri dari tiga yaitu *Reserves Requirement Policy*, *Open Market Operation*, *Rediscount Rate Policy*

1. *Reserves Requirement Policy*

Kebijakan ini pertama sekali dilakukan oleh bank sentral di Amerika Serikat pada tahun 1935 ketika Bank Sentral tersebut mampu mengatur persyaratan cadangan minimum (*required reserves*) untuk bank-bank umum. Pengaturan ini dimaksudkan agar bank-bank umum bereaksi terhadap perubahan besar masuknya emas dan valuta asing ke dalam perekonomiannya.

Di Indonesia kebijakan ini pertama sekali dilaksanakan sejak Pakto 1988, dikenal dengan Giro wajib minimum (GWM). Bank Indonesia menggunakan GWM untuk mengatasi pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi yaitu dengan menetapkan GWM menjadi 3 % pada Februari 1996. Ketentuan likuiditas wajib minimum sebelumnya menurut Pakto 1988 adalah 2 %. GWM pada dasarnya adalah sejumlah minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Keharusan menyediakan sejumlah minimum dana ini juga disebut likuiditas wajib minimum (*statutory reserve requirement*) yang saat ini sebesar 5 % dari dana pihak ketiga yang dihimpun berlaku sejak April 1997 (Dahlan Siamat,1999:57).

2. *Open Market Operation*

Kebijakan ini diartikan sebagai kegiatan pembelian atau penjualan surat-surat berharga oleh Bank Sentral. Kebijakan ini bertujuan antara lain :

Menjaga kesetabilan harga obligasi / surat-surat berharga dengan tingkat bunga bank secara timbal balik. Tingginya suku bunga bank yang ditetapkan pemerintah akan menurunkan harga obligasi / surat-surat berharga karena investor cenderung menyimpan uangnya di bank dan sebaliknya. Konsekuensinya, bila pemerintah ingin menaikkan harga obligasi / surat-surat berharga, maka suku bunga harus diturunkan. Kebijakan ini sekaligus memperkuat kebijakan politik diskonto dalam menentukan jumlah uang beredar.

Membayar / melunasi utang pemerintah, melalui penjualan obligasi pemerintah pada operasi pasar terbuka.

Di Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan melalui penjualan dan pembelian surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Untuk lebih mengefektifkan operasi pasar terbuka ini, Bank Indonesia telah mengembangkan kedua instrumen tersebut dengan menambah fasilitas *requirement* (repro) ke masing-masing instrumen sehingga saat ini di kenal SBI repro dan SBPU repro. (Dahlan Siamat, 1999:57).

Untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka, Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang merupakan instrumen dalam rangka pengetatan jumlah uang beredar. Sebaliknya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekspansi, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Kedua instrumen ini diharapkan akan dapat membantu perbankan dalam pengaturan likuiditas disamping untuk mengembangkan pasar uang.

3. *Rediscount Rate Policy*

Kebijakan ini digunakan untuk mengukur besarnya diskonto yang dikeluarkan terhadap bank-bank umum. Oleh karena itu, kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan politik diskonto, di mana Bank Sentral menentukan tingkat diskonto atau *first class bills*. Tindakan yang dilakukan Bank Sentral adalah merubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum untuk sejumlah pinjamannya terhadap Bank Sentral. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi tinggi rendahnya bunga yang dikenakan kepada nasabah bank-bank umum tersebut. Tinggi rendahnya tingkat bunga bank umum akan mempengaruhi besarnya kredit yang diminta oleh masyarakat yang akhirnya terlihat pada fluktuasi jumlah uang yang beredar.

Di Indonesia diskonto ini disediakan bagi bank-bank dalam rangka pengaturan likuiditas sehari-hari, khususnya bank yang menghadapi *maturity mismatch* antara penanaman dan pendanaannya. Kebijakan diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat berharga repro atau

penjaminan surat berharga. Surat berharga yang sering digunakan adalah SBI dan atau SBPU yang diskonto oleh bank lain. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter. Dalam hal diperlukan pengetahuan likuiditas maka tingkat diskonto dapat dinaikkan dan sebaliknya, dalam hal diperlukan pelanggaan likuiditas tingkat diskonto.

Pengendalian Kredit Selektif

Secara umum kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah penawaran uang dan kredit bank dan tingkat suku bunga umum. Jadi bukan untuk menentukan alokasi kredit di antara banyak pemakai dan penggunaannya. Fungsi alokasi atau penjatahan ini diserahkan pada swasta. Mereka yang percaya pada perekonomian pasar yang sangat bebas pada umumnya menyokong ketergantungan pokok atas manajemen moneter umum karena alokasi kredit membantu mengalokasikan sumber daya riil, yang menurut mereka harus dialokasikan melalui persaingan di pasar. Akan tetapi banyak orang, termasuk beberapa yang menyetujui ketergantungan pokok pada tindakan-tindakan umum, percaya bahwa tindakan ini harus dilengkapi dengan pengendalian selektif (*selective control*) yaitu dengan tindakan-tindakan yang akan mempengaruhi alokasi kredit, setidaknya sampai titik penurunan volume kredit yang digunakan untuk keperluan selektif tanpa harus menurunkan penawaran total dan menaikkan biaya kredit untuk semua keperluan.

Pengendalian kredit selektif dapat positif atau negatif. Pengendalian negatif (*negative controls*) berusaha untuk menurunkan penawaran atau menaikkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. Pengendalian positif (*positive control*) berusaha menaikkan penawaran atau menurunkan biaya kredit untuk keperluan khusus. Walaupun perhatian utama kita adalah pada pengendalian selektif oleh Bank Sentral, namun perlu diperhatikan pengendalian selektif oleh Bank Sentral dan banyaknya tindakan oleh instansi pemerintah lain mempengaruhi secara berarti terhadap alokasi kredit di antara penggunaan potensial atau para pemakai kredit.

Moral Suasion

Kebijakan ini akan efektif jika didukung oleh tindakan yang lebih positif oleh Bank Sentral. Kebijakan ini hanya akan bermanfaat pada saat tertentu saja sampai kebijakan yang fundamental dilakukan.

Di Indonesia, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makro ekonomi maupun kondisi mikro masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realitis. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, namun dengan tetap memberi kebebasan bagi perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar.

Kesimpulan

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan tersebut sebagai kebijakan makroekonomi dalam mengatasi tingkat inflasi.

Sebagai alat kebijakan moneter terdiri dari : pengendalian kredit umum yang terdiri dari tiga jenis yakni, *reserves requirement policy*, *open market operation*, dan *rediscount rate policy*. Kebijakan lainnya adalah pengendalian kredit selectif, dan *moral suasion*.

Di Indonesia, *reserves requirement policy* dikenal dengan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan menetapkan GWM pada tingkat tertentu. *Open market operation* dilakukan melalui penjualan dan pembelian surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). *Rediscount rate policy*, di Indonesia dikenal dengan nama politik diskonto, diskonto disediakan bagi bank-bank Indonesia sebagai pengaturan likuiditas sehari-hari yaitu dengan cara penjualan atau peminjaman surat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fabbozi, Frank J, 199, *Pasar dan Lembaga Keuangan* Jakarta Salemba Empat

2. Goldfeld Stephen M., and Chanler Lester V, 1996, *Ekonomi Uang dan Bank*, Edisi Kesembilan, Jakarta : Penerbit Erlangga.
3. Nopirin, 2000, *Ekonomi Moneter*, Buku I dan II, Edisi ke-4, Yogyakarta : BPFE-UGM
4. Rose, Peter S., 1997, *Money and Capital Market : Financial Institutions and Instrument in a Global*, Sixth Edition, Mc. Graw-Hill-Book Co. Singapore.
5. Siamat, Dahlan, 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta : LPFE-UI
6. SP., Iswardono, 1999, *Uang dan Bank*, Edisi 4, Yogyakarta: LPFE-UGM
7. Subagio, dkk., 1997, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta : STIE YPKN.